

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 mendapat sambutan yang baik dari penduduk setempat. Tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Mohammad Hatta bersedia melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah pendudukan Jepang. Sedangkan sebelumnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda mereka bersikap non-kooperatif.¹

Jepang datang ke Indonesia tidak memberikan kesejahteraan yang baik terhadap rakyat Indonesia. Melainkan kesengsaraan yang melebihi kejamnya penjajahan Hindia Belanda. Indonesia yang lama dijajah oleh Belanda dan berjuang merebut kemerdekaanya belum bisa mengusir Belanda. Pada akhirnya tentara Jepang yang bisa mengusir Belanda dari tanah jajahannya. Namun kekuasaan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya sekitar tiga tahun, dari tahun 1942-1945.

¹Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*(Jakarta : Balai Pustaka, 1993), p. 14.

Jepang mengalami serangan udara. Jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang pada tahun 1944 oleh angkatan perang Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 telah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.²

Pembentukan BPUPKI merupakan lanjutan dari pengumuman Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa yang pada 1 Maret 1945, *Saikoo Sikikan*, Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat *Gunseikan* (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan

²Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI...*, P. 66 – 67.

Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai yang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).³

Berita kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira oleh masyarakat Indonesia. Kalangan nasionalis Islam yang sudah lama menginginkan kemerdekaan, menunggu janji – janji Jepang. Keinginan kaum nasionalis ini mulai dilakukan ketika dibentuk BPUPKI oleh pemerintah Jepang. Maka persiapan ini mulai dimanfaatkan dan dijalankan sebaik – baiknya oleh kaum Nasionalis Islam.

Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai sering diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI memiliki dua masa sidang, yaitu masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada tanggal 10 juli 1945 sampai 17 juli 1945.⁴ Dipersidangan ini kaum nasionalis mulai merumuskan ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia.

³ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam Dan Pancasila* (Jakarta : Konpress, 2017), P. 23.

⁴ Aris Hardianto, *Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 1 (2016), P. 44.

Badan Penyelidik diumumkan oleh Jepang nama-nama para anggota. Kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang Peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa.⁵

Anggota BPUPKI membentuk Konstitusi Pemerintahan Indonesia yang ideal. Pembicaraan diawali dengan pembahasan mengenai Dasar-dasar Negara. Sebagian besar anggota BPUPKI memberikan gagasan terkait dasar Negara yang akan dibentuk.

BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wediodingrat. Didampingi dengan dua orang wakil ketua, yaitu Yasuo Ichibangase (anggota istimewa, orang Jepang) dan Raden Pandji Doeroso yang sekaligus merangkap sekretaris.⁶ Disidang tersebut adanya anggota yang berlatar belakang golongan gerakan Islam menginginkan Dasar-dasar Negara digali berdasarkan ajaran Islam, sedangkan anggota lain dari golongan gerakan kebangsaan menginginkan agar dasar negara digali dari nilai-

⁵ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta : Paradigma, 2004), P. 36.

⁶Julius Pour, *Djakarta 1945 Awal Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2013), P. 24

nilai budaya Bangsa. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan dari para peserta adalah pandangan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo adalah sebagai tokoh bangsa Indonesia yang melibatkan diri dalam gerakan kebangsaan melalui organisasi. Seperti, Muhammadiyah, Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Masyumi, dan lain sebagainya.

Pada masa pendudukan Jepang, keberadaan Ki Bagus Hadikusumo tampak lebih aktif lagi. Bagaimana ia harus menentukan sikap dan strategi sebagai seorang Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah dalam rangka menyelamatkan Muhammadiyah dari politik Jepang. Dan bagaimana langkah yang harus dilakukan Ki Bagus Hadikusumo dalam perjuangan di bidang politiknya, ketika Jepang pada masanya menghentikan seluruh kegiatan partai politik, dan menggantikannya dengan wadah baru bagi mereka.⁷

Keanggotaan BPUPKI maupun PPKI, terdapat dua kelompok yang sama – sama kuat mempertahankan pandangan

⁷ Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1983), P. 10.

dan ideologinya, yaitu golongan Nasionalis Sekuler dan golongan Nasionalis Islam, maka Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPUPKI, berdiri pada posisi sebagai golongan Nasionalis Islam. Sebagai seorang Nasionalis Islam, Ki Bagus Hadikusumo selalu menjadikan Islam sebagai dasar perjuangannya.

Selama proses perumusan Dasar Negara, Ki Bagus Hadikusumo tergolong anggota BPUPK dari golongan Nasionalis Islam yang paling keras dan gigih dalam memperjuangkan agar unsur – unsur Islam masuk dalam dasar Negara Indonesia merdeka. Lebih dari itu, pada saat menjelang pengesahan dasar Negara, peranan Ki Bagus Hadikusumo sangat menentukan, dimana sata itu Ki Bagus Hadikusumo menjadi pusat perhatian bagi golongan Nasionalis Sekuler.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk Meneliti ketokohan Ki Bagus Hadikusumo dan pemikirannya tentang konsep kenegaraan Islam di Indonesia, yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Peran Ki Bagus Hadikusumo Dalam Merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Alasan memilih Judul :

1. Karna Ki Bagus Hadikusumo sebagai anak bangsa yang berjasa besar dalam membangun fondasi bagi perumusan asas Indonesia merdeka yang majemuk, tetapi berdaulat, dan bersatu dalam wadah NKRI dan aktif berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, telah memberikan segenap upaya dan perjuangan demi tegaknya kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kemajuan bangsa berdasarkan ajaran Islam.
2. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah mewakafkan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Negara Dalam Konsep Politik Ki Bagus Hadikusumo?
2. Bagaimana Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia?

3. Bagaimana Peran Ki Bagus Hadikusumo Dalam Merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang :

1. Negara Dalam Konsep Politik Ki Bagus Hadikusumo
2. Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia
3. Peran Ki Bagus Hadikusumo Dalam Merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma – norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁸Sedangkan menurut Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), P. 735.

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁹

Arti dari kata peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, seorang yang mempunyai peranan dan pengaruh besar dalam menggerakkan revolusi. Suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam tugas seorang pemimpin. Istilah peran kerap diucapkan banyak orang, sering kita dengar kata peran dikaitkan dengan posisi seseorang dalam sebuah jabatan.¹⁰

Landasan Teori digunakan untuk membantu memastikan hal-hal yang diragukan dalam melaksanakan suatu penelitian, sehingga dengan adanya landasan teori, penelitian dapat berjalan sesuai rencana dan diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan mengartikan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini penulis menggunakan sebuah landasan teori yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yakni teori pemikiran.

⁹Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), P. 238.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka 2001), P. 845.

Sejarah pemikiran adalah sejarah tentang ide, semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, gerakan koperasi dipengaruhi oleh pemikiran Mohammad Hatta, gerakan Pendidikan Taman Siswa dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantoro, gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran KH. Ahmad Dahlan.¹¹ Ki Bagus Hadikusumo mempengaruhi pemikiran tentang Negara Islam untuk Dasar Negara Indonesia, dan gerakan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo ini yang sesuai bagi Indonesia.

Proses perumusan dasar Negara Indonesia, hingga disyiahkannya Pancasila sebagai dasar Negara, melalui tahapan-tahapan yang penuh ketegangan dan saling mempertahankan pandangan politik dan ideologinya antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis kebangsaan. Walaupun demikian, sebagai anggota BPUPK dari golongan nasionalis Islam, Ki Bagus dengan gigih memperjuangkan eksistensi unsur-unsur Islam dalam dasar dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tuan-tuan dan sidang yang terhormat! Dalam Negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan

¹¹Kuntowijoyo, *Metodelogi Sejarah, Edisi Kedua* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013), P. 189.

*bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada tidak memaksa tentang agama. Kalau benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam, karena ajaran Islam mengandung kesempaiannya sifat-sifat itu”.*¹²

Umat Islam mempunyai peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda dan Fasisme Jepang di Indonesia dapat dikatakan sebagai perlawanan Islam terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan. Perlawanan tersebut upaya dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam. Dalam arti luas karena Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil, antara lain:

Skripsi dari program studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

¹² Rizki Lesusu, *Perjuangan Yang Dilupakan Mengulas Perjuangan Umat Islam Yang Terlupakan Dalam Sejarah Indonesia...*, P. 25

Yogyakarta, (2012). Skripsi ini ditulis oleh Herguita Immas Raspati. Skripsi ini berjudul “Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan dasar Negara”. Pemikiran ini sama Ki Bagus Hadikusumo dalam hal menegakkan ajaran Islam di atas Negara Indonesia.

Deklarasi dan Rekomendasi Seminar Nasional
“Kenegarawanan Ki bagus hadikusumo”

Mengingat :

- a. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah mewakafkan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa
- b. Bahwa Ki Bagus Hadikusumo sebagai anak bangsa yang berjasa besar dalam membangun fondasi bagi perumusan asas Indonesia merdeka yang majemuk, tetapi berdaulat, dan bersatu dalam wadah NKRI dan aktif berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, telah memberikan segenap upaya dan perjuangan demi tegaknya kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kemajuan bangsa.

Menimbang : Bahwa Ki Bagus Hadikusumo diakui sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia, namun sampai saat ini belum diberikan anugerah dan pengakuan sebagai PAHLAWAN NASIONAL. Maka melalui momentum Seminar Nasional “Kenegarawanan Ki Bagus Hadikusumo”, dengan ini keluarga besar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) mendeklarasikan dan merekomendasikan:

Perlunya penelusuran dan pelurusan kembali sejarah dan perikehidupan Ki Bagus Hadikusumo serta sejumlah tokoh sejarah lainnya dengan perspektif yang lebih jernih, adil dan tidak bias pada kepentingan politik tertentu.¹³

Dibacakan saat proklamasi. Tapi katanya itu hilang, lalu ditulis oleh Bung Karno. Maka terjadilah teks coret-coretan yang menjadi teks proklamasi itu. Padahal seharusnya Piagam Jakarta itu.

¹³ Deklarasi dan Rekomendasi Seminar Nasional “*Kenegarawanan Ki bagus hadikusumo*” (Jakarta, 3 Agustus 2012)

Buku-buku yang komprehensif terhadap topik yang dikaji sebagai berikut:

Buku *pertama*, yang digunakan berjudul *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* karangan Deliar Noer, penerbit LP3ES, tahun terbit 1980, dan tebal buku 376 halaman. Buku ini membicarakan tentang pergerakan Islam antara tahun 1900-1942. Pada Bab I dan II membicarakan pengenalan dan pertumbuhan pemikiran dan kegiatan pembaharuan Islam yang umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu gerakan pendidikan dan sosial dan gerakan politik. Buku ini juga melukiskan sebab-sebab serta perkembangan-perkembangan dan perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dan desakan masyarakat modern. Dalam buku ini penulis banyak mengambil sumber mengenai latar pemikiran Islam pada era 40an dan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam keterlibatan menyusun Dasar Negara.

Buku *kedua*, yaitu *Partai Islam di Pentas Nasional* karangan Deliar Noer¹⁴, penerbit Pustaka Utama Grafiti, dan tebal buku 493 halaman. Dalam buku ini membahas tentang

¹⁴ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

perkembangan politik di Indonesia dari periode 1945–1965, terutama partai-partai Islam dalam lintasan sejarah. Deliar Noer mendeskripsikan bagaimana kinerja partai-partai Islam seperti Masyumi, PSII, Nahdatu Ulama, dan Perti pada masa revolusi kemerdekaan, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Di dalam isi buku hanya ada sedikit data yang sesuai dengan tema yang penulis ambil.

Buku ini juga berupaya untuk menjelaskan sisi-sisi menarik pergolakan Islam dalam menentukan kepemimpinan dan ideologi, kedudukan, dan peran hingga jatuh banggunya kabinet. Semua itu dijelaskan oleh Deliar Noer dengan didukung oleh literatur dan dokumen sejarah termasuk dokumen pribadi dari para tokoh. Dalam menjelaskan mengenai pertentangan ideologis antara golongan nasionalis dan Islam mengenai Dasar Negara. Sebagai contoh adalah Pemikiran Mohammad Natsir yang menawarkan Islam sebagai Dasar Negara, sedangkan golongan Nasionalis yang diwakili oleh Soekarno mengajukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan konflik antara Natsir dan Soekarno mengenai hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia pada masa sebelum

kemerdekaan, melalui berbagai tulisannya yang kemudian berkelanjutan hingga dalam pembahasan UUD yang baru sebagai pengganti UUD S 1950 di Majelis Konstituante.

Buku *ketiga*, yaitu *Islam dan Masalah Kenegaraan* karangan Ahmad Syafii Maarif¹⁵, penerbit LP3ES, dan tahun terbit 1987. Dalam buku ini menjelaskan secara detail tentang Islam yang dikaitkan dengan perumusan Dasar Negara Indonesia. Polemik-polemik seputar anggota BPUPKI yang mayoritas beragama Islam dan pengaruhnya serta sumbangsih dalam perumusan Dasar Negara. Dalam buku inilah adanya gagasan mengenai Dasar Negara Islam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam yang salah satunya Ki Bagus Hadikusumo.

Buku *keempat*, yaitu *Problematika Pemikiran Muslim* karangan Muhammad Tanthawi¹⁶, penerbit Adi Wacana. Dalam buku ini menjelaskan mengenai Islam hubungannya dengan politik beserta persoalan-persoalan pemikiran Islam terhadap pemerintahan Islam. Dalam buku ini penulis mengambil sumber

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987).

¹⁶ Muhammad Tanthawi, *Problematika Pemikiran Muslim*, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1997).

untuk menjabarkan kerangka konseptual seperti Islam dan politik, Islam dan demokrasi dan lain-lainnya.

Buku kelima, yaitu *Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam* karangan Imron Nasri penerbit Suara Muhammadiyah. Buku ini merupakan kumpulan khutbah tokoh Muhammadiyah pada masa lalu. Namun bila dibaca dengan seksama, bukanlah sekedar pidato seremonial. Akan tetapi terkandung makna dan amanat yang penting. Dalam beberapa kumpulan khutbah tersebut ada khutbah dari Ki Bagus Hadikusumo.

Buku keenam, yaitu *Islam Sebagai Dasar Negara (Pidato Mohammad Natsir di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959))*, tulisan Kholid O. Santosa (ed)¹⁷ yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit Segarsy tahun 2004. Buku yang merupakan referensi pembanding sekaligus pelengkap yang penulis ambil untuk menambah wawasan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo.

¹⁷ Kholid O. Santosa, *Islam Sebagai Dasar Negara (Pidato Mohammad Natsir di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI 1957-1959)*, (Bandung: Segarsy, 2004).

Buku *ketujuh*, yaitu *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo*, Mr. Kasman Singodimejo, K. H. Abdul Kahar Muzakkir penerbit Pimpinan Pusat Muhammadiyah, oleh editor Lukman Hakiem. Buku ini berbicara mengenai pemikiran Trio Patriot itu serta kiprahnya. Pemikiran-pemikiran yang diambil dari beberapa pidato Ki Bagus Hadikusumo yang termuat dalam buku ini dijadikan sumber bagi penulisan skripsi ini.

Dari beberapa sumber yang digunakan penulis, baik sumber primer maupun sekunder, tidak banyak data yang menjelaskan mengenai Ki Bagus Hadikusumo dan pemikirannya. Oleh karena itu, data-data yang terpisah itu dijadikan satu untuk mengambil Ki Bagus Hadikusumo dan pemikirannya. Penulis lebih menitikberatkan penulisan ini terhadap pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang Negara Islam dan hubungan antara Agama Islam dan Negara.

F. Metodologi Penelitian

Setelah merumuskan masalah tahapan selanjutnya yaitu metode penelitian. Penulis menggunakan metodologi penelitian

sejarah. Maka yang penulis lakukan adalah merupakan penelitian penulisan sejarah. Karena objek yang akan dikaji dan diteliti adalah penulisan sumber-sumber sejarah yang menceritakan masa lampau.

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini untuk membuat rekonstruksi sejarah yang sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengavaluasi, memverifikasi dan mensintesis data-data sehingga diperoleh fakta-fakta sejarah yang *credible*, melalui tahapan penelitian.

Penulis menggunakan rujukan buku *Pengantar Ilmu Sejarah* yang ditulis oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah, diantaranya : pemilihan topik, pengumpulan sumber (*heuristic*), verifikasi (kritik sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan).¹⁸

1. Pemilihan Topik

Tahapan pemilihan topik adalah tahapan dimana penulis menentukan arah mana yang akan ditempuh dan topik pembahasan apa yang akan diambil dalam

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013), p.69.

penelitiannya. Topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada ketertarikan terhadap topik penelitian tertentu atau pengenalan yang lebih dekat tentang hal terjadi disekitarnya. Sedangkan kedekatan intelektual adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada ketertarikan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, data atau sumber-sumber yang diperlukan bisa dicari melalui studi pustaka. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan intelektual karena penulis menggunakan sumber studi pustaka sebagai informasi dari topik yang diteliti. Setelah topik ditemukan barulah membuat sebuah rencana penelitian.

2. Tahapan Heuristik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa

lampau.¹⁹ Metode penulisan sejarah terbagi menjadi empat tahap, antara lain:

Menurut terminologinya heuristik dari bahasa Yunani *heuristiken* yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber primer dalam penelitian ini adalah naskah-naskah dalam proses perumusan dasar negara, naskah-naskah terkait tokoh penelitian dan beberapa karya tulis Ki Bagoes Hadikoesoemo yaitu *Islam Sebagai Dasar Negara, Achlak Pemimpin, Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam*. Kedua sumber sekunder, berupa karya-karya para tokoh yang membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia dan Ki Bagoes Hadikoesoemo dan pemikirannya baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk berita. Dalam mendapatkan bukti sejarah yang diperlukan baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan masalah yang diteliti, penulis juga mengadakan penelitian lapangan di berbagai perpustakaan, seperti: Perpustakaan, Perpustakaan UIN SMH Banten, Perpustakaan Daerah Kota Serang, Perpustakaan Daerah, Kantor Pimpinan

¹⁹ Louist, Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Presss, 1986) p. 32.

Muhammadiyah, Badan Arsip Daerah . Dari beberapa perpustakaan penulis mendapatkan buku-buku antara lain: *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia*²⁰ dan *Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam*²¹

3. Tahapan Kritik

Tahapan kritik atau tahapan verifikasi yaitu pengujian untuk memperoleh keabsahan sumber data, baik keasliannya dan keshahihannya melalui kritik eksternal dan internal. Verifikasi dilakukan melalui penelaahan terhadap sifat dan pengarang sumber, serta dilakukannya perbandingan sumber, baik melalui uji silang atau melalui kolaborasi, yaitu dengan membandingkan sumber-sumber yang bebas antara satu dengan yang lainnya.

4. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi atau penafsiran sumber dilakukan setelah diperoleh data-data sejarah hasil pengujian dan analisis data, pada tahapan ini dilakukan penafsiran dan

²⁰ Lukman Hakiem, *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia: Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimejo, K. H. Abdul Kahar Muzakkir*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

²¹ Imron Nasri, *Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

perangkaian data-data, sehingga didapatkan suatu rangkaian data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini, maka interpretasi berdasarkan suatu sumber penulisan lainnya.

5. Tahapan Historiografi

Terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam historiografi diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dan penyajian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan obyek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing - masing terdapat beberapa sub yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Negara Dalam Konsep Politik Ki Bagus Hadikusumo meliputi Pengertian Dan Gerakan Politik Ki Bagus

Hadikusumo, Kedudukan Negara Menurut Ki Bagus Hadikusumo, dan Hubungan Negara Dan Agama Menurut Ki Bagus Hadikusumo.

Bab Ketiga : Proses Perumusan Dasar Negara meliputi Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Perumusan Piagam Jakarta, Pengesahan Piagam Jakarta dan Undang – Undang Dasar.

Bab Keempat : Peran Ki Bagus Hadikusumo Dalam Merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia meliputi, Perjuangan Ki Bagoes Hadikoesoemo Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Polemik Dasar Negara Menurut Kalangan Islam Dan Kalangan Kebangsaan, Peranan Ki Bagus Hadikusumo Dalam Perumusan Dasar Negara.

Bab Lima : Penutup meliputi kesimpulan dan saran